



INDONESIA DI TENGAH TREN MODERNISASI COAST GUARD DI KAWASAN

Rizki Roza*

Abstrak

Rapat Dengar Pendapat Panitia Kerja Keamanan Laut (Panja Kamla) Komisi I DPR RI dengan Badan Keamanan Laut RI memperkuat gagasan pembentukan coast guard (CG) Indonesia. Gagasan ini berkembang saat negara-negara di kawasan melakukan modernisasi CG. Tulisan ini menganalisis tren modernisasi CG di kawasan dan apakah tren ini perlu menjadi pertimbangan dalam pembentukan CG Indonesia. Gagasan pembentukan CG Indonesia telah melewati dinamika yang panjang. Upaya memperkuat Bakamla dengan menerbitkan Peraturan Presiden No. 178 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2022 belum menghasilkan penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum yang efektif dan efisien. Ego sektoral dan tumpang tindih kewenangan masih menjadi hambatan. Bakamla juga belum memiliki postur yang ideal untuk menjalankan perannya, sementara CG negara-negara tetangga sedang tumbuh pesat. Keberadaan Panja Kamla diharapkan melahirkan CG Indonesia yang mampu mewujudkan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia, sekaligus menjadi CG yang mampu merespons dinamika lingkungan strategis Indonesia.

Pendahuluan

Panitia Kerja Keamanan Laut (Panja Kamla) Komisi I DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI pada 3 Maret 2025. Melalui RDP itu Kepala Bakamla RI, Laksamana Madya TNI Irvansyah, memaparkan urgensi pembentukan sistem keamanan laut yang komprehensif, berkelanjutan, adaptif, responsif, dan inklusif. Kepala Bakamla juga menyampaikan pentingnya pembentukan Undang-Undang tentang Keamanan Laut untuk meningkatkan kemampuan negara dalam menjaga kedaulatan dan memanfaatkan sumber daya alam dan potensi kemaritiman Indonesia. Menerima saran dan masukan dari Kepala Bakamla, Panja Kamla juga memiliki pandangan yang serupa. Ketua Komisi I DPR RI, Ahmad Heryawan, selaku pimpinan RDP, menyatakan bahwa Indonesia harus segera memiliki Undang-Undang yang mengatur keamanan laut dan yang menyatakan dengan tegas siapa yang menjadi *coast guard* (CG) Indonesia (Parlementaria, 2025). Gagasan pembentukan CG Indonesia terus menguat dalam beberapa tahun terakhir, terlebih dengan pembentukan Panja Kamla oleh Komisi I DPR RI ini.

*) Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI. Email: rizki.roza@dpr.go.id.

Gagasan Indonesia untuk memiliki CG tumbuh saat beberapa negara tetangga di kawasan telah lebih dahulu membentuk CG. Negara-negara tersebut, misalnya China dan Filipina, bahkan sedang melakukan modernisasi CG secara signifikan. Kebutuhan untuk meningkatkan kemampuan penegakan hukum di wilayah yurisdiksi dan menjaga klaim wilayah menjadi pendorong mereka meningkatkan anggaran dan melakukan pengadaan armada patroli yang lebih kuat. Tulisan ini menganalisis tren modernisasi CG di kawasan, dan apakah tren ini perlu menjadi salah satu bahan pertimbangan Panja Kamla dalam merekomendasikan pembentukan CG Indonesia.

Keterbatasan Peran Bakamla

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dengan sumber daya kelautan yang berlimpah yang sekaligus menghadapi tantangan besar dalam menjaga keamanan dan kedaulatan perairan dan wilayah yurisdiksi. *Illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing*, pencemaran laut, pembajakan dan perompakan di laut, penyelundupan, hingga tumpang tindih klaim wilayah merupakan tantangan yang harus dihadapi Indonesia. Untuk mengelola berbagai persoalan tersebut, saat ini sejumlah Undang-Undang mengatur kewenangan 12 kementerian/lembaga dalam mengelola keamanan laut Indonesia. Setidaknya terdapat enam instansi yang memiliki armada patroli dan melakukan kegiatan pengamanan di perairan dan yurisdiksi Indonesia, antara lain: TNI AL, Bakamla, Polri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Keberadaan banyak instansi ini ternyata dinilai tidak efektif dan efisien dalam menjamin keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia, antara lain akibat adanya tumpang tindih kewenangan. Kondisi ini yang kemudian mendorong berkembangnya gagasan pembentukan CG Indonesia.

Gagasan pembentukan CG Indonesia bukan merupakan hal baru dan sudah mengalami perkembangan yang cukup panjang. Salah satu momentum penting pembentukan CG Indonesia adalah pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Desember 2014. Jokowi secara resmi mengumumkan pembentukan Bakamla menggantikan Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 178 Tahun 2014 tentang Bakamla. Perpres tersebut memberi tugas kepada Bakamla untuk melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia (Wibisono, 2014). Sejak saat itu Presiden Jokowi berulang kali dalam berbagai kesempatan menyebut Bakamla sebagai embrio CG Indonesia.

Pada tahun 2022 pemerintah kembali mengeluarkan peraturan untuk memperkuat pengamanan laut Indonesia, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia. Saat itu presiden menyatakan bahwa PP ini dikeluarkan untuk mengatasi tumpang tindih penegakan hukum di laut dan pantai dan merupakan amanat dari UU No 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Melalui PP tersebut

diharapkan penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum (PKKPH) di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia berlangsung efektif dan efisien. PP ini memperkuat posisi Bakamla sebagai koordinator institusi dalam PKKPH (Yahya & Meiliana, 2022).

Keberadaan Perpres No. 178 Tahun 2014 dan PP No. 13 Tahun 2022 dalam perkembangannya belum mampu menghasilkan PKKPH yang efektif dan efisien. Banyak pihak menilai pengamanan laut Indonesia masih terkendala tumpang tindih kewenangan dan ego sektoral. Salah satunya sebagaimana yang disampaikan Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Lodewijk Freidrich Paulus, di hadapan Rapat Kerja Komisi I pada 11 Februari 2025. Lodewijk menyampaikan bahwa keberadaan 12 lembaga dengan wewenang masing-masing yang dilindungi UU masih menimbulkan ego sektoral. Di forum yang sama, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra juga menyoroti masih terjadinya tumpang tindih kewenangan penjagaan laut akibat banyaknya lembaga yang terlibat (Akbar, 2025).

Postur ideal Bakamla untuk menjaga keamanan laut Indonesia juga masih sulit dicapai meskipun sudah terdapat berbagai upaya penguatan landasan hukum. Keberadaan beberapa instansi yang berwenang menjaga keamanan laut Indonesia telah menyebabkan pemborosan anggaran. Bakamla hingga saat ini belum mencapai pemenuhan anggaran yang ideal. Dalam RDP dengan Komisi I, Kepala Bakamla menyampaikan bahwa sampai dengan Tahun Anggaran 2024, anggaran yang setiap tahunnya diperoleh Bakamla hanya mencakup 10 persen dari anggaran ideal. Bahkan pada tahun 2025 anggaran Bakamla hanya 729 milyar rupiah lebih rendah dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 1,084 triliun rupiah. Disampaikan pula bahwa untuk menjaga wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia yang sangat luas, Bakamla hanya didukung armada patroli yang sangat terbatas.

Modernisasi *Coast Guard* di Kawasan

Dinamika lingkungan strategis, tumpang tindih klaim wilayah, berkembangnya ancaman non-tradisional, dan berbagai faktor lainnya telah mendorong beberapa negara di kawasan untuk meningkatkan kemampuan dalam menjaga wilayah perairan dan yurisdiksinya melalui penguatan lembaga yang berwenang. Pemerintah Malaysia misalnya, secara resmi telah membentuk Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) pada 2005. Berperan sebagai CG, APMM ditugaskan untuk menegakkan hukum, dan ketertiban, dan melakukan operasi pencarian dan penyelamatan di zona maritim Malaysia dan di laut lepas. APMM diberitakan akan menerima kenaikan anggaran di tahun 2025 hingga mencapai 675 juta ringgit. Selain akan membeli sejumlah kapal baru, APMM juga akan menerima hibah kapal patroli bekas dari United States Coast Guard (USCG) pada 2025 (“MMEA to receive”, 2024).

Selain Malaysia, Filipina saat ini juga merupakan negara kawasan yang berkomitmen untuk memperkuat armada CG. Philippine Coast Guard (PCG) merupakan salah satu CG yang tertua di kawasan, yaitu dibentuk sejak 1967 dan dipisahkan dari Angkatan Laut (AL) pada tahun 1998. Dalam beberapa tahun terakhir, kekuatan PCG terus mengalami peningkatan signifikan. Pada November 2024 Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr., menyetujui pembelian lima buah kapal patroli. Persetujuan ini meningkatkan total pesanan kapal baru PCG menjadi 49 kapal. Personel PCG juga meningkat pesat dari 3,000 menjadi 30,000 personel. Kekuatan PCG dibutuhkan untuk memastikan keberadaan dan kemampuan penegakan hukum mereka di wilayah sengketa, terutama di Kepulauan Spratly di mana PCG seringkali berhadapan dengan kekuatan armada CG China dalam memperjuangkan klaim wilayah masing-masing (“Philippine Coast Guard”, 2024).

Pemerintah China saat ini menjadi negara di kawasan yang memiliki armada CG yang paling besar dibanding negara-negara tetangganya. China Coast Guard (CCG) dibentuk pada tahun 2013 dengan menggabungkan beberapa lembaga negara yang memiliki kewenangan di wilayah maritim dan berada di bawah kendali sipil. Pada 2018 CCG dipindahkan ke bawah komando militer dan merubah perannya sebagai pasukan paramiliter. Berdasarkan data 2019, CCG memiliki 130 kapal patroli jauh melampaui negara-negara tetangganya, bahkan menempatkannya sebagai badan penegak hukum maritim terbesar di dunia. Dengan kekuatan yang begitu besar, diikuti dengan klaim wilayahnya yang sangat luas terhadap perairan Laut China Selatan, telah berulang kali menempatkan CCG berhadapan dengan CG negara lain yang lebih lemah. Filipina bahkan menyebut China melakukan perundungan dengan tindakannya yang semakin agresif terhadap negara yang kekuatannya lebih kecil.

Uraian di atas menunjukkan bahwa Indonesia cukup tertinggal dalam pembangunan kekuatan CG di kawasan. Insiden antara Bakamla dan CCG di Laut Natuna Utara pada 2024 setidaknya bisa menjadi catatan penting. Pada Oktober 2024 Bakamla harus mengusir kapal CCG 5402 karena masuk ke dalam wilayah yurisdiksi Indonesia dan mengganggu kegiatan survei yang dilakukan oleh kapal MV Geo Coral PT. Pertamina East Natuna (Sirait & Susanti, 2024). Seperti negara lainnya di kawasan, Indonesia membutuhkan CG yang dapat diandalkan untuk menjaga keamanan, keselamatan, dan menegakkan hukum di perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, termasuk mampu mengimbangi kekuatan CG di kawasan.

Penutup

Gagasan untuk membentuk CG Indonesia telah melewati dinamika yang cukup panjang. Berbagai upaya menuju arah itu, termasuk dengan menerbitkan Perpres No. 178 Tahun 2014 dan PP No. 13 Tahun 2022 untuk memperkuat keberadaan Bakamla belum mampu menghasilkan PKKPH yang efektif dan efisien. Ego sektoral dan tumpang tindih kewenangan masih menjadi hambatan serius. Tidak hanya ketiadaan landasan hukum

yang kuat, keterbatasan peran Bakamla juga akibat minimnya dukungan anggaran untuk mencapai postur ideal. Dengan keterbatasannya, Bakamla masih harus berhadapan dengan CG negara-negara tetangga yang sedang tumbuh pesat.

Oleh karena itu, keberadaan Panja Kamla Komisi I DPR RI harus menjadi momentum penting untuk mewujudkan lahirnya CG Indonesia. Panja Kamla diharapkan mampu melahirkan CG Indonesia yang mampu mewujudkan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia, sekaligus menjadi CG yang mampu merespons dinamika lingkungan strategis Indonesia.

Referensi

- Akbar, A. (2025, Februari 11). Soroti tumpang tindih kewenangan, Yusril dorong bentuk RUU Keamanan Laut, *detiknews.com*. <https://news.detik.com/berita/d-7773504/soroti-tumpang-tindih-kewenangan-yusril-dorong-bentuk-ruu-keamanan-laut>
- MMEA to receive new ships, upgrade fleet with RM675 million allocation. (2024, Oktober 23). *freemalaysiatoday.com*. <https://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2024/10/23/mmea-to-receive-new-ships-upgrade-fleet-with-rm675-million-allocation/>
- Parlemntaria. (2025, Maret 3). *UU Keamanan Laut dibutuhkan untuk bentuk coast guard Indonesia*. <https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/UU-Keamanan-Laut-Dibutuhkan-untuk-Bentuk-Coast-Guard-Indonesia-54605>
- Philippine coast guard triples fleet with French and Japanese Newbuilds. (2024, November 7). *Themaritimeexecutive.com*. <https://maritime-executive.com/article/philippine-coast-guard-triples-fleet-with-french-and-japanese-newbuilds>
- Sirait, P. F. W. & Susanti, R. (2024, Oktober 21). Bakamla usir kapal coast guard China dari Natuna Utara. *Kompas.com* <https://regional.kompas.com/read/2024/10/21/221132678/bakamla-usir-kapal-coast-guard-china-dari-natuna-utara>
- Wibisono, K. (2014, Desember 16). Presiden resmi bentuk Badan Keamanan Laut. *Antaraneews.com*. <https://www.antaraneews.com/berita/469384/presiden-resmi-bentuk-badan-keamanan-laut>
- Yahya, A. N. & Meiliana, D. (2022, Maret 23). Jokowi terbitkan PP kuatkan Bakamla koordinator keamanan laut, ini respons KSAL, *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/23/20112861/jokowi-terbitkan-pp-kuatkan-bakamla-koordinator-keamanan-laut-ini-respons>

